PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Sutan Siregar ¹⁾, Pranjono ²⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

sutan.siregar@um.tapsel.ac.id ¹⁾
1967@gmail.com ²⁾

Abstrak

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana khususnya KDRT, Salah satu contohnya yaitu Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Karena didalam KUHP hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai KDRT yaitu dibuatnya Undang–Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana tujuan dari pembetukan Undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya tindak KDRT di dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Rumah tangga merupakan ranah yang sangat privasi karena rumah tangga seharusnya bukan merupakan konsumsi publik maka penanganan kasus KDRT Dalam penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan spesifik, bahkan permasalahan yang utama berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini di Indonesia.

Kata kunci : *Hukum, Korban, Tindak Pidana, KDRT*

Abstract

In Indonesia there are many criminal acts, especially domestic violence. One example is violence in the household or family sphere is mostly committed by a husband. Domestic violence is a problem that cannot be overcome just by looking at the Criminal Code. Because in the Criminal Code only generally regulate forms of violence. Therefore, special rules regarding domestic violence are needed, namely the enactment of Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Where the purpose of the establishment of the Act is to prevent acts of domestic violence in the family. Law No. 23/2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is to prevent all forms of domestic violence, protect victims of domestic violence, crack down on perpetrators of domestic violence and require the state and the community to play an active role in carrying out prevention, protection, and enforcement measures in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution. Households are a very privacy domain because households should not be a public consumption so the handling of domestic violence cases. In solving the problem of domestic violence, the lack of adequate and specific protection, even the main problems relating to law center on the absence of a law that specifically provides protection for victims of domestic violence in Indonesia.

Keywords: *Law, Victim, Crime, Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Segala bentuk kekerasan yang terjadi bagi perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Made (2015:1) menyatakan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang menjadi korban adalah perempuan (istri). Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan KDRT). Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Seharusnya setiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Namun realitas yang kita temui dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara harapan dan kenyataan. Tidak jarang kita menjumpai perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab bagi keretakan suatu rumah tangga, seperti tidak adanya keturunan (anak), ketidakcocokan satu

dengan lainnya, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan lain-lain. Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak kepada pihak lain. Berbagai hambatan dalam proses penanganan kasus tindak KDRT, baik berupa tindak diskriminasi maupun ketidakseriusan aparat penegak hukum, telah ikut mewarnai keadaan tersebut. Keadaan seperti ini tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan asas yang terkandung dalam UU PKDRT yang menyatakan bahwa penghapusan KDRT dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Namun dalam pelaksanaannya, UU PKDRT seolah dirasakan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban tindak KDRT.

Khaira (2017-768): Berbagai hambatan dalam proses penanganan kasus tindak KDRT, baik berupa tindak diskriminasi maupun ketidakseriusan aparat penegak hukum, telah ikut mewarnai keadaan tersebut. Padahal UU PKDRT secara eksplisit telah menjamin bahwa korban KDRT berhak mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Adapun jumlah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

No	Tahun	Jumlah
1	2015	15
2	2016	21
3	2017	14

Sumber : Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2018

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut maka, penulis tertarik dan mencoba menganalisisnya dalam berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dikemukakan permasalahan, bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konsep. Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan teknik deskripsi dan argumentasi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian bukan hukum.

Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan sehubungan dengan itu, dalam penerapan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, selain itu juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.

Penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri dilakukan di Kota Padangsidimpuan. Alat pengumpul data disamping berdasarkan studi kepustakaan juga dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data terhadap variable penelitian meliputi. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan agenda. Wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan nara sumber. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui hambatan dan solusi penegakan hukum (KDRT) terhadap istri.

PEMBAHASAN

Perilaku menyimpang dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan. Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, kita tinjau hal-hal yang terdapat Kriminologi. Karena menurut Sutherland and Cressey, Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.

Selanjutnya, disebutkan bahwa Kriminologi terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

1. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau permasayarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum Pidana,
2. Etiologi kriminil, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan, dan
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Pada pembahasan ini kita fokuskan pada etiologi pada etiologi kriminil yang berarti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan (*aethos* =sebab-sebab), yang dalam 3 (tiga) mazhab yaitu:

1. Mazhab Anthropologis atau Mazhab Biologis atau Mazhab Italia,
2. Mazhab Sosiologis atau Mazhab Prancis,
3. Mazhab Biososiologis atau Mazhab Gabungan atau Mazhab *convergentie*.

Ketiga mazhab tersebut termasuk ajaran determinan, yaitu kehendak manusia itu, sudah ditentukan terlebih dahulu.

Peletak dasar Mazhab Anthropologis adalah Cesare Lombroso yang menyatakan

bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang, sedangkan menurut Mazhab Sosiologis faktor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan (*niveau-theorie*) penjahat dan lingkungannya (*milieu-theori*) yang Manouvrier dan Lacassagne. Aliran yang ketiga yaitu Mazhab Biososiologis menggunakan *theorie convergentie* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan. Tokoh Mazhab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen. Menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh sederhana faktor-faktor tersebut antara lain adalah : sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga. Kejadian demi kejadian, periode demi periode, kekuatan-kekuatan relatif dari watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan berpengaruh terhadap seseorang.

Di muka telah disebutkan bahwa ketiga Mazhab tersebut menganut teori *determinisme*, yang mengemukakan bahwa seseorang melakukan kejahatan ditentukan (*determine*) oleh pengaruh luar atau lingkungannya, sedangkan menurut teori *indeterminisme*, kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan itu dikendalikan oleh kemauan sendiri dan tidak dipengaruhi oleh "faktor luar".

Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga bantuan hukum.

Menurut LKBHUKW sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila

menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-menurun, sebab anakanak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya.

Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

1. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang membunuh Nyonya Diah, istrinya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

2. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

3. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar

belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

4. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

5. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

6. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang

berakhir dengan kekerasan.

7. Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa "lebih" dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam "UndangUndang", di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.³⁶

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

5.1.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lembah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Adapun perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga

yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan “tersaingi” dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain hal-hal yang disebutkan di muka, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu pendorong.

1. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

2. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Aling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

Menurut Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Padangsidimpuan yang terdiri dari 1. Aiptu Ahmad Jamil Siregar, SH, 2. Brigadir Amun Kamil Siregar, SH, 3. Olivia Oninta Karokaro penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padangsidimpuan adalah:

1. Istri sering berlama-lama di luar rumah dan suami kurang dilayani, sehingga

membuat suami emosi.

2. Suami selingkuh
3. Istri selalu meminta uang belanja dan suami tidak memiliki uang, sehingga emosi.

Suami sering keluar rumah dan istri tidak merasa senang dan akhirnya bertengkar

5.1.3 Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Sanksi Penal

G. Peter Hoefnagels mengemukakan, bahwa ilmu pengetahuan kebijakan kriminal merupakan ilmu pengetahuan penanggulangan kejahatan. Selanjutnya dengan mendasarkan pada pendapat Marc Ancel, ia mengemukakan, bahwa :

“criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”. Hoefnagels juga mengemukakan, bahwa kebijakan kriminal sebagai ilmu pengetahuan kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan penegakan hukum. Sementara itu, kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial.

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *Kekerasan pada Anak: Bentuk, Penanggulangan, dan... - Sudaryono (social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat dijawab dalam berbagai bentuk. *Pertama*, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. *Kedua*, yakni berupa

usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang *ketiga*, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.

Bila dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka penerapan sanksi penal adalah ketentuan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. Penerapan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Adapun pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
2. Azas kemanusiaan
3. Edukatif
4. Manfaat
5. Keadilan

Peran masyarakat di wilayah hukum Padangsidimpuan masih sangatlah rendah, karena masyarakat masih menganggap bahwa sikap kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi rumah tangga yang bersangkutan. Untuk menyikapi hal tersebut tentunya diperlukan upaya seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkesinambungan kepada masyarakat agar memahami maksud dan tujuan dari Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun hambatan lainnya terhadap penerapan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga tidak mengadopsi pasal-pasal dalam KUHP
2. Belum ada kata standar tentang legalitas suami-istri
3. Masih bersifat penafsiran.

Maka daripada itu perlu segera direvisi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, karena masih banyak kelemahan dalam penerapannya. Jika dilihat dari keterangan penerapan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dapat dikatakan bahwasanya ada permasalahan di penerapan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut dikarenakan terdapat kelemahan di undang-undang tersebut. Maka daripada itu perlu kiranya merevisi undang-undang tersebut.

B. Hambatan-Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur, menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada Polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik, maupun psikis.

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut.

1. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP.
2. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.
4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

Selanjutnya dalam setiap langkah menuju suatu perubahan dan perbaikan seringkali mendapat hambatan atau halangan seperti disebutkan di muka. Demikian pula dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, meskipun sudah dibuat undang-undang khusus yang dapat dipergunakan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain hambatan dalam proses penyidikan, terdapat hambatan yang dapat berasal dari faktor intern maupun faktor ekstern artinya bisa datang dari korban kekerasan sendiri maupun dari keluarga korban, masyarakat dan Negara.

Berikut akan diuraikan satu per satu hambatan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut :

1. Hambatan dari korban dapat terjadi karena:
 - a. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;
 - b. Korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan oleh korban berpendapat bahwa tindakan suami akan berubah;
 - c. Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya, sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus "bakti" (setiap dan mengabdikan) pada suami;
 - d. Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan;
 - e. Korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya di dalam masyarakat;
 - f. Korban takut ancaman dari suami;

- g. Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri;
 - h. Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga.
 3. Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga akan merupakan hambatan bagi penegakan hukum di bidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
 4. Hambatan dari negara
 - a. Hambatan ini berupa ketentuan bahwa biaya *visum et repertum* harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan.
 - b. Selain itu dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kedalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

- c. Menurut Ahmad Jamil “hambatan berikutnya dari negara misalnya korban melapor dan tidak memiliki surat nikah sehingga tidak bisa dikatakan KDRT”

Berbagai hambatan tersebut mengakibatkan korban menjadi sulit untuk mendapatkan keadilan. Adapun bagi suami yang melakukan tindak kekerasan seakan-akan dilindungi dengan adanya ketentuan tersebut.

Karena dalam delik aduan relatif hanya korban atau keluarganya yang berhak mengadukan perbuatan pelaku, sedangkan dalam delik aduan absolut hanya korban yang berhak melakukan pengaduan. Dalam undang-undang tidak dijelaskan apakah Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 termasuk delik aduan absolut atau delik aduan relatif.

Dengan demikian, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tetap berada dalam posisi yang lemah di mata hukum. Dalam penelitian ini memperoleh analisis data penerapan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap istri sebagai berikut: **PUTUSAN** Nomor : 623/Pid.Sus/2017/PN.PSP.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian pengaturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan fa(safah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi

karena ada faktor pemicu atau pendorong.

Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Faktor Internal yaitu 1) cemburu, 2) masalah anak, 3) masalah sopan santun, 4) masalah masa lalu, 5) masalah salah paham, 6) masalah tidak memasak, 7) suami mau menang sendiri. Faktor eksternal yaitu 1) masalah keuangan, 2) masalah orang tua, 3) masalah saudara.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- a. Sanksi Penal, penerapan sanksi penal adalah penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Sanksi Non Penal, Kebijakan non penal dalam kekerasan dalam rumah tangga diatur di dalam Pasal 10 yaitu : Korban berhak mendapatkan: a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) pelayanan bimbingan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Freda, et.al, (1995). *Criminology, Second Edition*. USA: McGraw - Hill
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Utama, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice*

- System) *Perspektif Eksistensialisme dan Abolisinisme*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Beccaria, Cesare, 1964, *Of Crime and Punishment*. Original Italian Title *Dei Delitti e Delle Pene (1764)*, english Translation by Jane Grigson, edition Copy Right, Marsilio Publisher, New York.
- Bemmelen, J.M. van, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Materil Bagian Umum*. Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1991, *Hukum Pidana 2, Hukum Penitentier*, Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.
- Ediwarman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UMSU, Medan.
- Elmina, Aroma, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Ull Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Refonnasi*, Prandya Paramita, Jakarta.
- Herlina, Apong et.al, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Unicef, Jakarta.
- Hubberman, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- HS. Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Jauhari, Iman, 2008, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Kelsan Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, ahli bahasa Sumardi, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- .Land Hari, 1987, *Modern Jurisprudensi (Kuala Lumpur International Law Book Service)*.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno dan Pittlo, A, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1996, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Nawawi, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas Hukum Pidana*, Ghafia Indonesia, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- B. Peraturan Perundang-undangan**
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- C. Putusan Pengadilan**
 Nomor : 623/Pid.Sus/2017/PN.PSP